

BAB VI

PENUTUP

6.1 Program Transisi

Pelaksanaan program RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 pada dasarnya tidak hanya berhenti pada tahun 2013. Ada beberapa program pembangunan yang perlu dilanjutkan lagi karena menjadi prioritas dan strategis bagi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2008-2013. Salah satu contohnya adalah program pengembangan infrastruktur untuk mendukung agroindustri yang merupakan tahap lebih lanjut dari pengembangan pertanian.

Program-program inilah yang kemudian masuk dalam tahap transisi dalam rangka membangun kesinambungan kebijakan. Implementasi dari program-program ini tentunya membutuhkan komitmen para pemangku kepentingan khususnya pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat (eksekutif dan legislatif).

Patut diperhatikan bahwa harus terjadi pergeseran paradigma pembangunan menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara riil; dimulai dengan upaya penyadaran dan pemahaman bersama sampai tahap implementasi. Hal ini adalah konsekuensi dari keberlanjutan implementasi dari program-program yang ada karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan menjaga keberlanjutan program-program tersebut.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang baik tentunya yang efisien (*cost efficient*) dan efektif (tepat sasaran). Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih. Upaya ini dilakukan

dengan adanya *leading sector* dari SKPD untuk setiap program sehingga akan memudahkan koordinasi program-program yang sifatnya lintas sektoral.

Selain itu, perlu diperhatikan keberlanjutan dari program-program strategis yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana setiap kebijakan mempunyai program-program yang saling berkesinambungan secara waktu pelaksanaan.

6.2.1 RPJMD merupakan Pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Renstra SKPD

Pada dasarnya RPJMD menjadi perwujudan kebijakan dan program untuk mencapai Visi dan Misi kepala daerah. Dalam tataran implementatif, tentunya peran SKPD sangat penting dalam rangka pensinergian dengan Visi dan Misi yang ada. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2008-2013 perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD dalam bentuk renstra SKPD.

6.2.2 RPJMD akan Digunakan dalam Penyusunan RKPD

RPJMD berjangka waktu 5 tahun dan digunakan untuk menyusun RKPD per tahunnya. Dengan demikian, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD.

Program-program yang ditawarkan RPJMD masih memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil. Dalam RKPD ini, kerangka pembiayaan akan lebih jelas tergambar.

Untuk itu di masa mendatang, pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private-partnership*), perlu lebih digali untuk memperbesar alternatif sumber pembiayaan pembangunan.

6.2.3 Penguatan Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan RPJMD

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 ini disusun, selain dari proses teknokratik, juga berdasarkan partisipasi dari pemangku kepentingan kunci yang meliputi unsur pemerintah kabupaten, desa dan kecamatan, dan pengusaha. Pelibatan ini sangat penting terutama untuk membangun pemahaman dan kepemilikan bersama bahwa semua pihak mempunyai peran penting dalam membangun Kabupaten Bandung Barat. Tentunya, hasil yang didapat akan mempunyai legitimasi yang lebih kuat.

6.2.4 Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja Lima Tahunan

Dokumen RPJMD ini akan sangat membantu pemerintah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa indikator penting baik kualitatif maupun kuantitatif untuk melakukan evaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, RPJMD merupakan panduan evaluasi mengenai keberhasilan kepala daerah selama lima tahun.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR